



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin. Telp. (0526) 2028408

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 45/Kum TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya dan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenkatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah serta, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang penyusunan revisi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenkatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. SUTIRNO, M.AP
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19760417 199412 1 001

USAN SEKRETARIS DAERAH BALANGAN
 R 188.45/ /SETDA/Kum TAHUN 2021
 NG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2021-2026

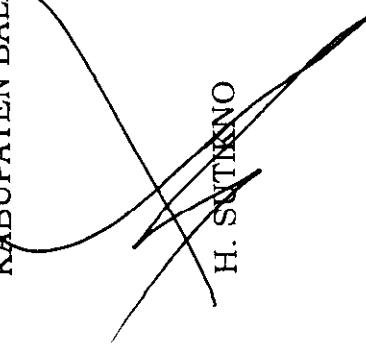
- isi : Sekretariat Daerah
- : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
- : Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- : Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
- : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- : Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah
- : Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025				
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	B = 66.04	B = 68.4	BB = 70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2	Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja , evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja	Bagian Organisasi	Bappedalitbang Inspektorat Bagian Organisasi dan seluruh SKPD

<p>Indeks Pelayanan Publik</p>	<p>3,01 (-B)</p>	<p>3,01 (-B)</p>	<p>3,40 (-B)</p>	<p>3,51 (B)</p>	<p>3,80 (B)</p>	<p>4,01 (-A)</p>	<p>4,91 (A)</p>	<p>4,91 (A)</p>	<p>Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p>
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>82.53</p>	<p>82.55</p>	<p>83.60</p>	<p>83.70</p>	<p>84.00</p>	<p>84.50</p>	<p>85.00</p>	<p>85.00</p>	<p>Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p>
<p>Makna : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. (Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik))</p>	<p>Alasan Pemilihan : guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan</p> <p>rumus perhitungan: Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator <ul style="list-style-type: none"> • Nilai per indikator = $\frac{\text{Nilai Perolehan (A)}}{\text{Bobot Indikator}}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek <ul style="list-style-type: none"> • Nilai per aspek = $\sum \text{Nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks <ul style="list-style-type: none"> • Nilai indeks = $\frac{\text{Nilai Aspek}}{\text{Bobot Aspek}}$ <p>Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem Informasi pelayanan public, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi</p>	<p>Bagian Organisasi</p>	<p>Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p>	<p>Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.</p>	<p>Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p>				

	<p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan unit pelayanan public</p>	
	<p>Perhitungan atau penjelasan : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot / jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p>	

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
BAGIAN HUKUM

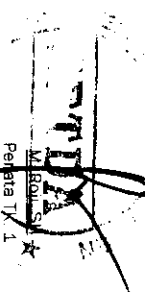
ESELON III

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026		Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Mengastikan kualitas standar pelayanan produk hukum daerah dan informasi hukum harmonisasi produk hukum	Tingkat kepuasan layanan produk hukum dan informasi hukum	83	84	85	86	87	91	Makna Indikator : kemampuan layanan penyusunan produk hukum Asasas Pemilihan Indikator : perlunya mengikut tingkat kepuasan layanan Cara Hitung : memagi dan menilai kuisisioner penerima manfaat layanan		
2	Mengapatkan kualitas pelayanan bantuan hukum kepada ASN dan SKPD sesuai standar hukum	Tingkat kepuasan layanan penanganan kasus/perkara	83	83	83	83	83	83	Makna Indikator : kemampuan layanan penanganan kasus/perkara Asasas Pemilihan Indikator : perlunya mengikuti tingkat kepuasan layanan Cara Hitung : membandingkan dan menilai kuisisioner ke penerima manfaat layanan	Kabag Hukum	Hasil Survei
3	Mengapatkan harmonisasi produk hukum	persentase produk hukum yang di harmonisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator : tidak ada produk hukum saeran yang tumpang tindih Asasas Pemilihan Indikator : dinamisnya kebijakan pusat dan daerah Cara Hitung : jumlah produk hukum yang saeran di harmonisasi di bagi jumlah produk hukum yang sudah di harmonisasi di kali 100		

Eselon IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026		Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya pelayanan produk hukum daerah yang berkualitas	persentase jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator : gambaran fasilitas penyusunan produk hukum daerah Asasas Pemilihan Indikator : dimasukkannya jumlah layanan penanganan produk hukum sesuai tahunnya Cara Hitung : jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah layanan produk hukum di kali 100	Sub Bag Peraturan Perundang-undangan	Rekapitulasi Produk Hukum
2	Terlaksananya pelayanan Bantuan Hukum	persentase penanganan kasus/ pengaduan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator : jumlah kasus/ perkara yang ditangani di bagi jumlah perkara yang masuk di kali 100 Cara Hitung : Jumlah kasus/ perkara yang ditangani di bagi jumlah perkara yang masuk di kali 100	Sub Bag Bantuan Hukum	Laporan penanganan perkara
	Terlaksananya Aksi dan Pelaporan RANHAM	Jumlah pelaporan RANHAM	3	3	3	3	3	15	Makna Indikator : terlaksananya aksi HAM sebagaimana tertuang dalam perpres 53 tahun 2021 Asasas Pemilihan Indikator : Satu Aksi HAM diampu oleh beberapa SKPD Cara Hitung = Jumlah pelaporan RANHAM Kabupatèn	Sub Bag Bantuan Hukum	Laporan RANHAM SKPD
3	Terlaksananya pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase Produk hukum Daerah yang didokumentasi/ publikasikan dan dapat di akses	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator : gambaran hasil pendokumentasian produk hukum daerah Asasas Pemilihan Indikator : jumlah produk hukum yang dilaksanakan setiap tahun tidak Cara Hitung : jumlah produk hukum daerah yang di dokumentasikan di bagi jumlah produk hukum daerah yang didaftarkan di kali 100	Sub Bag Dokumentasi dan Informasi	Rekapitulasi Produk Hukum

Kepala Bagian Hukum



M. B. S. M. S.
Pelajar T. A.
NIP. 19830710 201001 1 020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

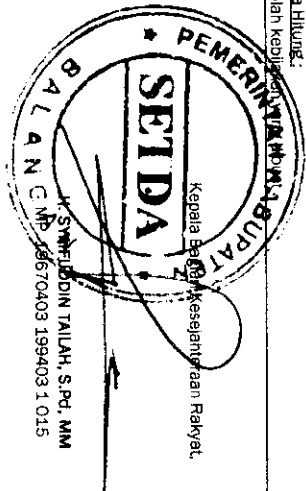
ESLON III

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Asas/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Optimalisasi Penerapan Kebijakan Daerah di Sektor Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Tepat Sasaran	100	100	100	100	100	100	<p>Makna Indikator: Adanya kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Menjadikan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat sebagai dasar dalam memberikan bantuan sehingga tepat sasaran</p> <p>Cara Hitung: Jumlah kebijakan yang dibuat dibagi jumlah target kebijakan dikali 100%</p> <p>Makna Indikator: Bertunggunya tempat ibadah dengan baik</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Tempat ibadah dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan Cara Hitung: Jumlah tempat ibadah yang mendapatkan bantuan</p>	Kabag Kesejahteraan Rakyat	

ESLON IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Asas/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan sehingga terbitnya kebijakan yang tepat sasaran	2	2	2	2	2	2	<p>Makna Indikator: Tersedianya bahan untuk pembuatan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan</p> <p>Cara Hitung: Jumlah bahan yang didapatkan dibagi jumlah target dikali 100%</p> <p>Makna Indikator: Terealisasinya rekomendasi bantuan untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Rekomendasi sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan</p> <p>Cara Hitung: Jumlah rekomendasi yang dibuat dibagi jumlah target rekomendasi dikali 100%</p>	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	
2	Terfasilitasinya pengembangan bina mental spiritual	Persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang mendapat rekomendasi bantuan	100	100	100	100	100	100	<p>Makna Indikator: Permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat dirumuskan kebijakannya</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat dirumuskan kebijakannya</p> <p>Makna Indikator: Permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat diselesaikan</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Kesepakatan antar umat beragama sangat diperlukan agar tidak terpancing isu-isu yang dapat memecah belah dan membu terjadinya SARA</p> <p>Cara Hitung: Jumlah kebijakan yang dibuat</p> <p>Makna Indikator: Terselisinya bantuan hibah untuk organisasi keagamaan dan tempat ibadah</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Terakumulasinya organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah</p> <p>Cara Hitung: Penjumlahan semua organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah</p>	Sub Bagian Bina Mental Spiritual	
3	Tersusunnya kebijakan pelaksanaan dan tempat evaluasi terkait kesejahteraan sosial	Jumlah organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang diberikan bantuan hibah (organisasi)	76	45	46	47	48	49	<p>Makna Indikator: Terselisinya bantuan hibah untuk organisasi keagamaan dan tempat ibadah</p> <p>Asas Pemulihan Indikator: Terakumulasinya organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah</p> <p>Cara Hitung: Penjumlahan semua organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah</p>	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	

	Jumlah Organisasi keagamaan yang diberikan bantuan operasional (organisasi)	5	5	5	5	5	5	5	Makna Indikator: Terealisasinya bantuan operasional untuk organisasi keagamaan	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
	Jumlah kebijakan yang tepat sasaran (kebijakan)	2	2	2	2	2	2	2	Makna Indikator: Tersusunnya kebijakan yang mendasari pemberian bantuan hibah dan bantuan operasional	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
									Asas, Pemilihan Indikator: Terakumulasinya organisasi keagamaan	
									Cara Hitung: Penjumlahan semua organisasi keagamaan penerima bantuan	
									Asas, Pemilihan Indikator: Sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan operasional	
									Cara Hitung: Jumlah kebijakan	



 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 K. SYAFIUDIN TALAH, S.Pd, MM
 No. 06670403 199403 1 015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
BAGIAN PEMERINTAHAN

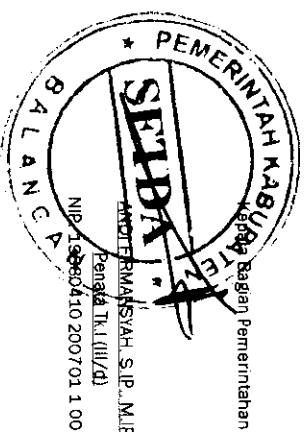
ESSEKON III

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Asas/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumbu
1	Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator: Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu cara untuk dapat memperoleh Nilai EKPPD yang optimal. Asas: Pemilihan Indikator: Penilaian Kualitas LPPD berbanding lurus dengan Nilai EKPPD. Cara Hitung: Jumlah SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap x 100% : Jumlah SKPD yang menyusun bahan LPPD		
2	Meningkatkan kualitas PATEN di Kecamatan	% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator: Meningkatkan kualitas PATEN di Kecamatan merupakan salah satu filosofi dari pemerintahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat menjadi lebih dekat. Asas: Pemilihan Indikator: Predikat baik merupakan standar minimal pelayanan kepada masyarakat Cara Hitung: Jumlah Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik x 100% : Jumlah Kecamatan	Kabag Pemerintahan	
3	Terjaminnya pilar batas daerah Kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	10 titik	15 titik	20 titik	20 titik	20 titik	20 titik	Makna Indikator: Pilar batas daerah yang sesuai titik koordinat harus dipastikan terpasing dengan kondisi baik Asas: Pemilihan Indikator: Memastikan pilar batas yang ada sesuai titik koordinat Cara Hitung: Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat yang dimonitoring dan evaluasi		

ESSEKON IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Asas/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumbu
1	Terlaksananya fasilitas administrasi KDH dan Pejabat Negara serta Rakor Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan program/kerja dan permasalahan yang di tindaklanjuti dan/atau dimediasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Makna Indikator: Meningkatkan kualitas fasilitas administrasi KDH dan Pejabat Negara serta Rakor Pimpinan Daerah agar perumusan/dibambilah kebijakan daerah berjalan dengan optimal Asas: Pemilihan Indikator: Pendambilan kebijakan terdapat permasalahan yang ditindak lanjuti/dimediasi terfasilitasi Cara Hitung: Jumlah Laporan program/kerja dan permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau dimediasi	Sub Bag Administrasi Pemerintahan	
2	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Ekonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Ekonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Makna Indikator: Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Ekonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI ke-76 merupakan momentum yang sakral untuk mewujudkan Balangan yang lebih baik Cara Hitung: Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Ekonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	Sub Bag Administrasi Pemerintahan	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Alasan/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Pemangku Jawab	Sumbu
1	Terlaksananya Pembinaan PATEN di Kecamatan	Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan	2.991	3.05	3.1	3.15	3.20	3.22	Makna Indikator: Meningkatkan kualitas PATEN di Kecamatan merupakan salah satu filosofi dan pelepasan kewenangan Bupati kepada Camat dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat menjadi lebih dekat Alasan Pemilihan Indikator: SKOR PATEN menyesuaikan ketentuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cara Hitung: Skor kumulatif PATEN dari 8 Kecamatan : 8 Kecamatan	Sub Bag Administrasi Kewilayahan	
2	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Nama Rupabumi	Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai ketentuan	6 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	Makna Indikator: Jumlah desa yang di inventarisasi setiap tahun Alasan Pemilihan Indikator: tersedianya data dan informasi penamaan rupabumi/Toponimi Desa Cara Hitung: Jumlah Desa yang berhasil di inventarisasi setiap tahun	Sub Bag Administrasi Kewilayahan	
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pilar batas daerah	Jumlah pilar batas daerah yang dimonitoring dan evaluasi	10 titik	15 titik	20 titik	20 titik	20 titik	20 titik	Makna Indikator: Pilar batas daerah yang terpasang sesuai titik koordinat yang harus dimonitor dan dievaluasi setiap tahun Alasan Pemilihan Indikator: Memastikan pilar batas daerah yang terpasang sesuai titik koordinat Cara Hitung: Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat yang dimonitoring dan evaluasi		
1	Terlaksananya pembinaan terhadap SKPD penyusun bahan LPPD dan LKPJ	Jumlah SKPD yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator: Kecepatan waktu penyampaian bahan LPPD dan LKPJ oleh SKPD merupakan salah satu cara agar LPPD dan LKPJ Kabupaten dapat diselesaikan tepat waktu. Alasan Pemilihan Indikator: Kecepatan penyampaian bahan penyusunan LPPD dan LKPJ berdampak langsung dengan penyelesaian LPPD dan LKPJ kabupaten Cara Hitung: Jumlah SKPD yang menyusun bahan LPPD dan LKPJ tepat waktu x 100%. Jumlah SKPD yang menyusun bahan LPPD dan LKPJ		
2	Terlaksananya pembinaan terhadap SKPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar	Jumlah Laporan SPM yang disampaikan tepat waktu	6 Urusan	6 Urusan	6 Urusan	6 Urusan	6 Urusan	6 Urusan	Makna Indikator: Kecepatan waktu penyampaian laporan SPM merupakan bagian dari penyusunan laporan Kabupaten Alasan Pemilihan Indikator: Kecepatan penyampaian laporan SPM akan mempengaruhi proses input dan penilaian pada https://smpn.bangsa.kemendagri.go.id/ Cara Hitung: Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan SPM tepat waktu	Sub Bag Kejasama dan Otonomi Daerah	
3	Terlaksananya fasilitas kerjasama daerah	Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10 Kesepakatan	10 Kesepakatan	10 Kesepakatan	10 Kesepakatan	10 Kesepakatan	10 Kesepakatan	Makna Indikator: Memastikan kualitas dokumen kerjasama daerah yang di tindaklanjuti Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah usulan dokumen kesepakatan kerjasama yang di usulkan, diasilasi dan ditindaklanjuti Cara Hitung: Jumlah usulan dokumen kesepakatan kerjasama yang di usulkan, diasilasi dan ditindaklanjuti		



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 - 2026

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Alasan/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	S
-----	---------------	-------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	------------------	---

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1	optimalisasi penerapan kebijakan daerah di sektor pembangunan daerah	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	<p>Makna Indikator: telaahan/arahan kebijakan dari pimpinan (KDH/WKDH, Sekda, Asisten, Staf ahli dan hasil rakor terkait pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: data yang dapat digunakan untuk pencapaian tujuan kebijakan, mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan</p> <p>Cara Hitung: jumlah telaahan/arahan kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah telaahan/arahan kebijakan yang dihasilkan setelah evaluasi dan monitoring $1 \times 100\%$</p> <p>Makna Indikator: melihat progress pelaksanaan pembangunan dari hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: memastikan hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan pencapaian target capaian khususnya pada sektor pembangunan daerah</p> <p>Cara Hitung: jumlah hasil monitoring yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah telaahan/arahan kebijakan yang dihasilkan setelah evaluasi dan monitoring $1 \times 100\%$</p>	Kabag Administrasi Pembangunan	laporan pelaksanaan daerah dan bersan
		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100			

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

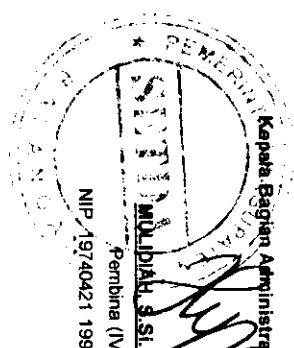
1	Tersusunnya bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi bahan rakor	2	4	4	4	4	4	<p>Makna Indikator: menyediakan data/informasi hasil evaluasi kinerja SKPD untuk menjadi bahan pelaksanaan Rakor SKPD masing-masing asisten</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: laporan evaluasi kinerja menjadi data dasar dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Melalui laporan ini akan diketahui seberapa jauh progress capaian program/kegiatan dan permasalahan yang terjadi menjadi lebih cepat dapat ditangani</p> <p>Cara Hitung: hasil dari evaluasi kinerja yang disampaikan SKPD kepada Bappeda akan direkapitulasi dan dibagi sesuai dengan bidang urusan gakor masing-masing asisten untuk kemudian ditindaklanjuti melalui rakor dan monitoring lapangan guna mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan ataupun peluang2 dalam peningkatan pelaksanaan target pembangunan daerah</p>	Kasubbag Penyusunan Program	Laporan trvuu tahunar dana D Bapp Evaluasi
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------------	--

KASUBB. / ENGDALIAN PROGRAM

1	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan Daerah dan koordinasi bidang pengendalian program	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan	2	4	4	4	4	4	4	<p>Makna Indikator : laporan progress pelaksanaan program dan kegiatan, setelah dilaksanakan pembina</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : diperlukan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan setiap pengendalian perlu didokumentasikan dan diarsipkan melalui laporan secara tertulis</p> <p>Cara Hitung : laporan progress pelaksanaan program dan kegiatan, setelah dilaksanakan pembinaan, move dan evaluasi. Akan dilaksanakan rakor minimal setiap triwulan dan tahunan.</p>	Kasubbag Pengendalian Program	Lapora bersa Asiste mor program evalu pem
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------------------------	---

KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

1	Tersedianya hasil pelaksanaan program pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	2	4	4	4	4	4	4	<p>Makna Indikator : menyediakan data hasil pelaksanaan program pembangunan daerah yang didapatkan melalui rakor dan move lapangan dan melaksanakan pembinaan sedita meringkas permasalahan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Laporan atas pelaksanaan program pembangunan memudahkan merupakan cara terbaik dalam penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah</p> <p>Cara Hitung : jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pelaksanaan pengendalian dan tindak lanjut atas pengendalian yang dilaksanakan yang disampaikan tepat waktu kepada Kepala Daerah sebagai bahan laporan progress pembangunan daerah, kepada Bappeda sebagai bahan penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran kepada Biro Adbang sebagai laporan progress kinerja pembangunan Kabupaten/Kota dan pihak lainnya (laporan dibuat per triwulanan tahunan yang isinya memuat laporan progress capaian kinerja SKPD, laporan hasil monitoring, laporan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil move, dan laporan hasil evaluasi kebijakan yang dilaksanakan guna menunjang pencapaian target capaian program)</p>	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	lapo perba penge has terha
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------------------------	--



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

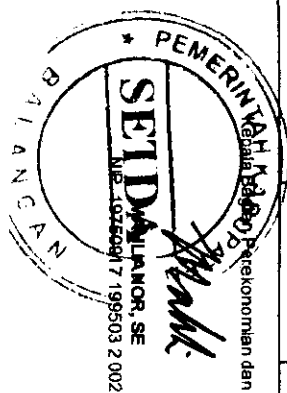
ESEKON III

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Alasan/ Maksud/ Deskripsi Operational/ Cara Hitung	Pemangku Tugas
1	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil di implementasikan	80	90	90	90	100	100	Makna Indikator: kebijakan yang dibuat untuk memutarakan sektor perekonomian yang akan di laksanakan dan di implementasikan oleh SPPD terkait. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat melihat capaian program kegiatan yang terkait kebijakan sektor perekonomian. Cara Hitung: Jumlah kebijakan yang sudah di implementasikan di setiap SKPD terkait, dibagi jumlah kebijakan sektor perekonomian keseluruhan. Makna Indikator: mendefinisikan sumber daya alam yang ada di SKPD terkait kemudian Identifikasi area SKPD dapat dapat mengidentifikasi. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat terdapat permasalahan di sumber daya alam yang akan diidentifikasi oleh SKPD terkait. Cara Hitung: Jumlah permasalahan yang diidentifikasi dari jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Makna Indikator: membentuk Badan Usaha Milik Daerah atau membentuk Badan Layanan Umum Daerah. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat memfasilitasi dan memfasilitasi sektor pembentuk BLUD dan BLUD. Cara Hitung: Jumlah BLUD/BLUD yang terbentuk	KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN SDA
2	Meningkatnya penyelesaian masalah sumber daya alam	Persentase permasalahan SDA yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti	80	80	90	90	100	100	Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat terdapat permasalahan di sumber daya alam yang akan diidentifikasi oleh SKPD terkait. Cara Hitung: Jumlah permasalahan yang diidentifikasi dari jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi.	
3	Membuat kebijakan pengelolan Pendirian BUMD/BLUD yang ditetapkan	Jumlah BUMD/BLUD yang dibentuk	0	1	0	0	0	0	Makna Indikator: membentuk Badan Usaha Milik Daerah atau membentuk Badan Layanan Umum Daerah. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat memfasilitasi dan memfasilitasi sektor pembentuk BLUD dan BLUD. Cara Hitung: Jumlah BLUD/BLUD yang terbentuk	

ESEKON IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Alasan/ Maksud/ Deskripsi Operational/ Cara Hitung	Pemangku Tugas
1	Melakukan analisis/ajian pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan analisis pengendalian inflasi daerah	4	4	4	4	4	4	Makna Indikator: laporan yang dikumpulkan untuk menganalisis permasalahan inflasi daerah. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat mengetahui dan memonitoring laporan tim pengendalian inflasi daerah. Cara Hitung: Jumlah dokumen laporan inflasi daerah yang di laporkan	Sub Bag Ekonomi
2	Meningkatnya kualitas pegawai ekonomi mikro	Jumlah laporan Pengawasan ekonomi mikro	1	1	1	1	1	1	Makna Indikator: laporan yang dikumpulkan terkait pengawasan ekonomi mikro. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat memonitoring ekonomi mikro. Cara Hitung: Jumlah laporan dari SKPD terkait. Makna Indikator: memonitoring dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di SKPD terkait sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat secara monitoring dan memonitoring permasalahan yang ada di SKPD terkait. Cara Hitung: Jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi.	Sub Bag Ekonomi
3	Penyelesaian permasalahan pelaksanaan kebijakan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi pada pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	1	1	1	1	1	Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat secara monitoring dan memonitoring permasalahan yang ada di SKPD terkait. Cara Hitung: Jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari jumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi.	Sub Bag Sumber Daya Alam

4	Membuat tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor energi dan air	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor energi dan air yang telah diselesaikan	1	1	1	1	1	1	1	1	Makna Indikator: 'mendidik' (rekomendasi hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor energi dan air)	Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat menunjukkan jumlah rekomendasi hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor energi dan air yang telah diselesaikan	Cara Hitung: Jumlah tindak lanjut dari rekomendasi	Sub Bag Sumber Daya Air	D
5	Membuat tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertanian dan lingkungan hidup pada SKPD terkait	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertanian dan lingkungan hidup pada SKPD terkait	1	1	1	1	1	1	1	1	Makna Indikator: menunjukkan rekomendasi hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertanian dan lingkungan hidup pada SKPD terkait	Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat menunjukkan jumlah rekomendasi hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertanian dan lingkungan hidup pada SKPD terkait	Cara Hitung: jumlah tindak lanjut dari rekomendasi pada SKPD terkait	Sub Bag Sumber Daya Air	D
6	Tersedia/nya analisis/kegiatan/umumun terhadap pengembangan dan pengelolan BUMD/BLUD	Jumlah laporan pengelolaan kebijakan BUMD/BLUD yang direalisasikan dan dilaporkan oleh BUMD/BLUD	4	4	4	4	4	4	4	4	Makna Indikator: laporan pengelolaan kebijakan yang dibuat oleh BUMD/BLUD	Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat mengkoordinasikan dan sinkronisasi dan monitoring dan mengevaluasi pengelolaan BUMD/BLUD	Cara Hitung: Jumlah laporan pengelolaan kebijakan BUMD/BLUD	Sub Bag Pembinaan BUMD dan BLUD	Data
7	Tersedia/nya dan termonitornya pendirian BUMD/BLUD	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi pendirian BUMD/BLUD	1	2	2	2	2	2	2	2	Makna Indikator: melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pendirian BUMD/BLUD	Alasan Pemilihan Indikator: dengan adanya indikator tersebut dapat mengkoordinasikan dan sinkronisasi dan mengevaluasi pendirian BUMD/BLUD	Cara Hitung: jumlah laporan pendirian BUMD/BLUD	Sub Bag Pembinaan BUMD dan BLUD	Data



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

ESelon III

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Makna Indikator	Asasan/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber
1	Meningkatnya independensi dan akuntabilitas proses PBJ	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	80	80	100	100	100	100	Makna indikator : Pemanfaatan Sistem Pengadaan dalam PBJ meliputi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing, E-Kontrak Asaan Pemilihan Indikator : Pemanfaat Sistem pengadaan masih belum maksimal pada SKPD Cara Hitung : Persentase Pemanfaatan Pengadaan = Nilai Rata-rata (Persentase SIRUP + E-tendering+ E-Purchasing+Non E-purchasing + Ekontrak) Makna indikator : Kemampuan UKPBJ mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level Proaktif (Level 3) Asaan Pemilihan Indikator : Kematangan UKPBJ Level Proaktif (Level 3) salah satu indikator perhitungan indeks Tata Kelola Pengadaan Cara Hitung : Persentase Kematangan UKPBJ Level Proaktif = Jumlah Indikator Variabel Kematangan UKPBJ yang terpenuhi dibagi jumlah indikator Variabel Kematangan UKPBJ keseluruhan di kali 100%	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan UKPBJ	
		Persentase Kematangan UKPBJ Level Proaktif	66	77	88	88	100	100	Makna indikator : Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola Fungsi PBJ dilakukan berdasarkan persentase ketesiran Formasi Jf PBJ terhadap formasi yang sudah ditunjuk dan penetapan kebutuhan Jf PBJ dan KEMERIPAN-RB atau rekomendasi kebutuhan Jf PBJ dan LKPP Asaan Pemilihan Indikator : Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ menjadi salah satu indikator perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Cara Hitung : Persentase kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ = Jumlah Jf PBJ di UKPBJ di bagi Jumlah Kebutuhan Jf PBJ di kali 100%	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan UKPBJ	

Eselon IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Makna Indikator	Asasan/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber
1	Meningkatnya Penyelesaian proses pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan melalui BPBJ yang selesai	100	100	100	100	100	100	Makna indikator : meningkatkan fungsi fasilitas pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa Asaan Pemilihan Indikator : perlu ditingkatkan fungsi fasilitas pemilihan penyedia Bagian Pengadaan Barang dan Jasa perlu ditingkatkan Cara Hitung : Persentase pengadaan melalui BPBJ yang selesai = Jumlah Paket Pemilihan Selesai dibagi Jumlah Paket Pemilihan yang masuk di proses BPBJ di kali 100	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan UKPBJ	
2	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi SPSE	Persentase pemanfaatan aplikasi SPSE dalam PBJ	10	20	30	40	50	60	Makna indikator : Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam BPBJ dapat terukur dan meningkat Asaan Pemilihan Indikator : Pemanfaatan aplikasi SPSE oleh SKPD dapat meningkat dan maksimal Cara Hitung : Persentase pemanfaatan aplikasi SPSE dalam PBJ = Jumlah Realisasi Transaksi melalui SPSE di bagi Jumlah Belanja Pengadaan di kali 100	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan UKPBJ atau Data LH	
3	Meningkatnya kompetensi SDM PBJ	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi	5	6	9	9	9	10	Makna indikator : SDM PBJ yang memiliki kompetensi dapat terpenuhi Asaan Pemilihan Indikator : SDM PBJ yang memiliki kompetensi menjadi salah satu indikator perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Cara Hitung : Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi = Jumlah Jf PBJ yang memiliki kompetensi	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan UKPBJ	

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



H. Taufiqurrahman, STP, M.Si
NIP. 19750814 200112 1 005

**IN RATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

ESELON III


No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Makna Indikator: Alasan/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Pemangku Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas layanan keprotokolan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Opini Publik yang positif terhadap Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayan	100	100	100	100	100	100	Makna Indikator: Merupakan tingkat persentase Pemenuhan Layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah Alasan/Definisi Indikator: Mengetahui pencapaian persentase pemenuhan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah Cara Hitung: Realisasi keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibagi kegiatan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terdapat X 100%	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Realisasi Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di kabupaten Balangan	100	100	100	100	100	100	Makna Indikator: Merupakan tingkat persentase pemenuhan informasi dan ekspose kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serta kegiatan pembangunan di seluruh media informasi komunikasi publik Alasan/Definisi Indikator: Mengetahui pencapaian persentase pemenuhan informasi dan ekspose kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serta kegiatan pembangunan di seluruh media informasi komunikasi publik Cara Hitung: realisasi media yang mengekspose kegiatan pimpinan dibagi jumlah seluruh media informasi dan pubikasi di Balangan X 100%	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Realisasi Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

ESELON IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	target tahun 2021	target tahun 2022	target tahun 2023	target tahun 2024	target tahun 2025	target tahun 2026	Makna Indikator: Alasan/Makna/Definisi Operasional/Cara Hitung	Pemangku Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	Makna Indikator: merupakan tingkat persentase Kegiatan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Alasan/Definisi Indikator: mengetahui pencapaian persentase Kegiatan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Cara Hitung: Realisasi keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibagi kegiatan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terdapat X 100%	Kepala Sub Bagian Protokol	Laporan Realisasi Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2	Teraksananya Fasilitas Bahan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyempaan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan	persentase Peleyaran Bahan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyempaan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	Makna Indikator: merupakan tingkat persentase Peleya Bahan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyempaan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Asas Penilaian Indikator: mengetahui pencapaian persentase Peleyaran Bahan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyempaan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Cara Hitung: Realisasi: meda yang mengekspose kegiatan pimpinan dibagi jumlah seluruh kegiatan pimpinan yang terfasilitasi x 100%	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Laporan Realisasi Program Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3	Teraksananya Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	persentase Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	Makna Indikator: merupakan tingkat persentase liputan dan dokumentasi kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Asas Penilaian Indikator: mengetahui pencapaian persentase liputan dan dokumentasi kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cara Hitung: Realisasi: Pendokumentasian kegiatan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibagi kegiatan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terjadwal x 100%	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Laporan Realisasi Program Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah


MURDIANSYAH S. STP. M.I.P.
 Kepala / II-C
 NIP. 49900521 201206 1 002